



### *Country State Role for Indigenous People in the RI-PNG Border Region (Case Study: In Kampung Skouw Mabo Muara Tami District)*

## **Pasang Surut Peran Negara Bagi Masyarakat Adat di Wilayah Perbatasan RI-PNG (Studi Kasus di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami)**

**Melyana Ratana Pugu**

Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Cendrawasih, Papua, Indonesia.

Email: [puguratana@yahoo.com](mailto:puguratana@yahoo.com)

#### ARTICLE INFO

##### *Keywords:*

*Implementation;  
Evaluation, Utilization;  
Educational Program;  
Yalimo.*

##### *How to cite:*

*Pugu, M.R. (2017).  
Pasang Surut Peran  
Negara Bagi Masyarakat  
Adat di Wilayah  
Perbatasan RI-PNG (Studi  
Kasus di Kampung Skouw  
Mabo Distrik Muara  
Tami). Jurnal Ilmu Sosial  
(JIS) Papua. 4(1): 12 – 19.*

#### ABSTRACT

*Skouw Mabo is one of Indonesia's border villages located in the district of Muara Tami Kota Jayapura which is directly adjacent to Wutung Papua New Guinea. The area of Skouw Mabo is 87.70 Km<sup>2</sup> with 518 inhabitants. This border research study uses qualitative research methods in which it explains the role of the state and citizens of Indonesia-Papua New Guinea. The outcome of this study is that the role of the country in the border region in the study in the village of Skouw Mabo District of Muara Tami Jayapura City has not run optimally because firstly, the resources of the low-level government apparatus. Second, supporting facilities and infrastructure are very minimal good infrastructure, health, education and market. Third, there is no master plan for the development of border villages established by the state. Similarly, the role of citizens in this case indigenous peoples in the village area Skouw Mabo not optimal because people are not prosperous due to the lack of facilities and supporting infrastructure above also due to the low human resources of this village community.*

## **1. Pendahuluan**

Indonesia memiliki daerah perbatasan yang sangat luas baik berupa darat maupun perbatasan laut dengan negara lain. Setidaknya ada enam provinsi yang memiliki daerah perbatasan langsung dengan negara lain yaitu provinsi Riau, provinsi Kalimantan Timur, provinsi Kalimantan Barat, provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan provinsi Papua. Setiap kawasan perbatasan memiliki dinamika persoalan tersendiri, karakter sosial ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Bahkan dinamika kawasan perbatasan juga sangat berpotensi menimbulkan sengketa perbatasan diantara negara-negara.

Dalam kajian hubungan internasional, dikenal dua karakter globalisasi yaitu *interdependensi* dan *interpenetrasi* yang melahirkan tantangan besar bagi eksistensi dan praktek pengelolaan negara. *Interdependensi* merujuk pada kondisi dimana keberhasilan pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan tidak lagi dapat mengandalkan kekuatan dan sumber daya domestik. Negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraan menjadi amat tergantung pada sumber daya yang dimiliki negara lain. Sedangkan *interpenetrasi* merujuk pada proses dimana negara tidak bisa lagi mengelola urusan-urusan domestik tanpa memperhatikan dinamika internasional dan sebaliknya.

Disatu pihak, pemerintah, masyarakat negara lain serta kekuatan-kekuatan global secara langsung maupun tidak langsung dapat ikut menentukan agenda hukum, politik, ekonomi domestik suatu negara. Namun, dipihak lain kebijakan-kebijakan internal suatu negara dapat membawa konsekuensi sosial, politik dan ekonomi bagi masyarakat negara lain. Salah satu tantangan yang lahir dari meningkatnya *interdependensi* dan *interpenetrasi* global adalah pengelolaan kawasan perbatasan.<sup>1</sup> Pada masa lalu manajemen kawasan perbatasan bertumpu pada kapasitas militer dan negara sebagai kekuatan pelindung dari intervensi luar. Saat ini dengan pola manajemen yang terdesentralisasi lebih bertumpu pada sebuah *network of governance* yang melibatkan pemangku kepentingan yang beragam. Yang diartikan bahwa dinamika persoalan perbatasan harus dijawab dengan pendekatan kesejahteraan atau *Prosperity Approach*.

Di Provinsi Papua terdapat 5 wilayah atau kabupaten/kota yang berbatasan secara langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digul dan Kabupaten Merauke. Masing-masing wilayah memiliki model pengelolaan yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, Kota Jayapura yang memiliki perbatasan langsung di Distrik Muara Tami khususnya Kampung Skouw Mabo menjadi perhatian utama dalam rangka melihat peran negara dan juga peran masyarakat di kampung ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG dalam meningkatkan kesejahteraannya. Penelitian ini bermaksud untuk melihat dan mempelajari apa saja dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya otonomi khusus Papua bagi masyarakat perbatasan didaerah tersebut. Hal lain yang ingin dipelajari dalam penelitian ini tantangan apa saja yang dihadapi oleh negara dan masyarakat sebagai aktor-aktor dalam hubungan internasional saat ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah ilmu hubungan internasional khususnya yang berkaitan dengan masyarakat perbatasan dua negara (RI-PNG). Selain itu, bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berupa data dan gambaran tentang peran negara bagi masyarakat perbatasan sehingga menjadi acuan untuk mengoptimalkan peran negara dimasyarakat perbatasan. Dan bagi masyarakat adat perbatasan secara khusus dan warga negara secara umum adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peran negara dan juga peran warga masyarakat dikawasan

---

<sup>1</sup>Ludiro Madu dkk, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*, Graha ilmu Press, Yogyakarta, Hal.V

perbatasan, tantangan yang dihadapi serta solusinya dalam mengisi pembangunan menuju kesejahteraan bersama.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul pasang surut peran negara bagimasyarakat adat dikawasan perbatasan RI-PNG merupakan Penelitian Kualitatif yang didalamnya memakai data dalam bentuk kata-kata atau gambar meskipun dalam ukuran lain serta penelitian kualitatif dapat juga menggunakan angka yang terbatas pada klasifikasi kategori.<sup>2</sup> Jenis penelitian yang gunakan adalah Penelitian Deskriptif yakni adanya pemaparan data secara terstruktur, sistematis, dan terkontrol dengan menjelaskan dari hal-hal yang umum bahkan juga sebaliknya yang khusus untuk menggambarkan gejala sosial dan hubungannya.<sup>3</sup> Lokasi penelitian dilakukan di wilayah perbatasan RI-PNG khususnya di Kampung Skouw Mabo. yaitu salah satu kampung yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dan berada diujung distrik Muara Tami kota Jayapura.

Pengambilan data dalam penelitian dilakukan secara bertahap yaitu studi kepustakaan yakni dengan mengambil dan menganalisa data dari sumber buku, jurnal, laporan, serta media masa, cetak, dan internet. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data dengan mendatangi instansi atau lembaga-lembaga terkait. Dan tahap berikutnya adalah wawancara dan studi lapangan / observasi yaitu dengan mengunjungi kampung Skouw Mabo, melihat kondisi kampung perbatasan secara langsung dan melakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pemerintah distrik Muara Tami dan warga masyarakat perbatasan di kampung tersebut.

Teknik analisa data kualitatif dan kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini. Analisa kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah dengan melakukan organisasi data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, menintensifikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selain itu juga akan melalui proses penyajian data, analisa serta menarik kesimpulan.<sup>4</sup> Selanjutnya penggunaan analisa kuantitatif mengacu pada penyajian data-data berupa angka-angka, perhitungan, pengukuran dan statistik. Kemudian metode ini juga menyertakan data dari wawancara, angket serta kuisioner ataupun dokumen.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- **Peran Negara bagi Masyarakat Adat di Perbatasan RI-PNG**

Wilayah negara republik Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua adalah kesatuan wilayah yang berdaulat dan didalamnya dihuni oleh penduduk yang notabene adalah masyarakat Indonesia dengan keragaman budaya dan karakternya. Peran negara dalam hubungan internasional adalah menetapkan batas-batas negara, mengawasi

---

<sup>2</sup>Ulber Silalahi,2012, "Metode Penelitian Sosial, Bandung," PT Revika Aditama, Hal. 39.

<sup>3</sup>Neuman WL.,2007, Social Research Methods, Qualitative and quantitative approach, Fourth Edition, Boston: Allyn and Bacon, Hal. 21

<sup>4</sup>Bogdan dan Biklen, 2008, dalam Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, cetakan kedua, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

batas negara dan meningkatkan rasa persatuan diantara penduduk diwilayah perbatasan. Di dalamnya tentu saja ada peran untuk melindungi wilayah teritorialnya dan melindungi otonomi warga negaranya. Tujuan negara dalam hal ini pemerintah pada daerah perbatasan adalah perlindungan secara tegas bagi siapa saja yang hendak masuk ke suatu wilayah perbatasan negara dengan cara dihentikan dan diseleksi. Kehadiran negara diwilayah perbatasan menggambarkan kedaulatan negara. Sehingga peran negara adalah menjaga keamanan wilayah dan melindungi penduduk perbatasan khususnya stabilitas keamanan. Jika dengan wilayah yang aman maka kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat pada wilayah perbatasan akan berjalan dengan baik. Atau dapat dikatakan tiga domain utama diwilayah perbatasan adalah kedaulatan negara, pertahanan negara dan pemberdayaan masyarakat perbatasan.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kondisi masyarakat di wilayah perbatasan selalu dihantui dengan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Bila dilihat lebih dalam lagi maka jenis kemiskinan yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut bisa dikatakan sebagai kemiskinan struktural dan situasional. Yang dimaksud dengan kemiskinan struktural dalam konteks ini adalah tidak hadirnya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pada wilayah tersebut yang mana tercermin dari kurangnya sarana dan prasana pendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi serta perumahan. Sedangkan kemiskinan situasional adalah kemiskinan yang terjadi karena adanya konflik yang berkepanjangan pada wilayah lain sehingga menyebabkan adanya eksodus secara besar-besaran pada wilayah yang mengakibatkan wilayah tujuan eksodus tersebut menerima beban yang berlebih. Kelompok eksodus inilah yang kemudian menjadi kelompok orang miskin baru pada wilayah tersebut.

Masalah tersebut yang kemudian menjadikan wilayah perbatasan menjadi suatu wilayah yang sangat terbelakang dan rawan konflik-konflik sosial dalam hal perebutan lahan dan sebagainya. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyelesaikannya terutama untuk mengurangi angka kemiskinan pada wilayah tersebut. Cara yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan memberdayakan masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan tersebut. Karena dengan begitu masyarakat dapat membebaskan dirinya dari lingkaran kemiskinan baik secara fisik maupun mental.

Peran negara yang dilakukan oleh pemerintah diwilayah perbatasan RI-PNG secara umum termaktub dalam kerjasama Indonesia-Papua Nugini dalam wadah *Joint Border Committe* (JBC) yang bertugas untuk mengatur semua permasalahan yang terjadi dikawasan perbatasan, mulai dari pelintas batas, keamanan sepanjang garis perbatasan, dan juga pengaturan pasar tradisional. Secara sederhana peran negara dimainkan oleh pemerintah daerah level terendah yaitu Pemerintahan Kampung Skouw Mabo di Distrik Muara Tami yang terdiri dari Kepala kampung, sekertaris kampung, urusan umum dan urusan keuangan, seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi pembinaan masyarakat, dan kepala dusun.

Peran pemerintahan kampung kampung Skouw Mabo di Distrik Muara Tami berdasarkan hasil pengamatan penulis diatur berdasarkan kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, partisipasi dan pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut yaitu pemerintahan kampung di Skouw Mabo yang terdiri dari 2 RW dan 3 RT dengan jumlah jiwa 518 jiwa.<sup>5</sup> Sebagian besar penduduk hidup dari bercocok tanam dan mencari ikan di laut. Dalam keseharian mereka, pemerintah kampung berjalan dengan baik hal ini terlihat dari struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kampung, dalam penerimaan dana kampung atau keuangan dan aset kampung yang dipergunakan untuk pembangunan kampung Skouw Mabo. Menyelesaikan perselisihan masyarakat kampung juga mengembangkan perekonomian masyarakat kampung melalui pasar tradisional perbatasan yang letaknya tidak jauh dari kampung Skouw Mabo.

Infrastruktur yang dimiliki oleh kampung ini adalah jalan yang menghubungkan kampung Skouw Mabo dengan kampung lainnya yaitu Skouw Sae dan Skouw Yambe, memiliki 2 bangunan tempat ibadah ( gereja), terdapat 1 kantor pemerintahan Kampung, terdapat 1 Posyandu. Rumah warga sebagian besar adalah rumah sederhana yang terdiri dari setengah bangunan batu dan setengah adalah bangunan tripleks. Saluran irigasi masih sangat sederhana dan letak geografis sangat dekat dengan lautan pasifik. Sebagai kampung yang terletak ditengah antara kampung Skouw Sae dan Skouw Yambe diwilayah perbatasan Indonesia - Papua Nugini maka peran negara bagi masyarakat masih sangat kurang karena ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat minim di kampung ini meskipun dana yang diterima untuk kampung sangat beragam baik dana Otonomi Khusus, Dana Prospek maupun dana pemerintahan kampung, namun dalam rangka pemberdayaan masyarakat di kampung ini dilihat belum memiliki kemajuan berarti.

- **Peran Masyarakat Adat Perbatasan RI-PNG**

Penduduk perbatasan dikampung Skouw Mabo adalah penduduk asli Papua ras Melanesia yang berjumlah 581 jiwa yang mendiami wilayah dengan Luas wilayah 87,70 KM2. Terdiri dari tiga dusun dalam satu kampung ini. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan, bercocok tanam dan berjualan di pasar tradisional perbatasan.

Peran masyarakat adat sebagai penduduk perbatasan dikampung Skouw Mabo dapat dilihat dari upaya masyarakat kampung untuk tetap membangun kampungnya hal ini terlihat dari upaya menjaga kebersihan kampung Skouw Mabo yang merupakan kampung dengan panorama pantai yang indah, terlihat beberapa bangunan sederhana yang dibangun warga untuk pengunjung yang ingin bersantai di pantai Skouw. Warga juga aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung seperti dalam rapat kampung yang dilakukan kepala kampung maupun Badan musyawarah kampung.

Sebagai penduduk yang dekat dengan wilayah perbatasan, masyarakat di kampung ini masuk dalam kategori masyarakat miskin walaupun secara geografis berada dekat

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Esau Mallo, kepala kampung Skouw Mabo tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Kampung Skouw Mabo jam 09.30 Wit.

dengan ibukota provinsi Papua. Hal ini berdasarkan indikator angka melek huruf dikampung ini yang menurut pengamatan penulis tergolong rendah karena belum banyak masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai SMA maupun perguruan tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis berdasarkan wawancara dengan kepala Kampung, Esau Mallo dijelaskan bahwa dikampung ini yang menjadi sarjana (S1) masih sangat kurang. Sehingga dalam rangka pengembangan kampung ke depan diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia perbatasan dikampung ini.

Kegiatan perekonomian masyarakat pun sangat sederhana, yaitu hanya bercocok tanam, mencari ikan yang hasilnya dijual dipasar tradisional perbatasan maupun untuk dikonsumsi sendiri. Kegiatan diversifikasi pangan pun belum terlihat dikampung ini yang berdampak pada kegiatan perekonomian yang rendah dimana barang yang dijual kepasar tradisional perbatasan RI-PNG di Skouw-Wutung hanyalah pinang, umbi-umbian, sayur-mayur dan ikan sehingga dapat dikatakan kegiatan ekonomi belum menunjang kehidupan masyarakat dikampung ini. Dalam bidang kesehatan, penduduk dikampung Skouw Mabo tidak memiliki Puskesmas tersendiri tetapi terdapat puskesmas di jalan utama yang menghubungkan tiga kampung perbatasan ini baik Skouw Mabo, Sae maupun Yambe.

Berdasarkan uraian diatas maka peran penduduk perbatasan dikampung Skouw Mabo masih sangat rendah karena minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat dikampung ini meskipun ditunjang oleh banyak kegiatan pendanaan dari pemerintah namun dalam pengamatan Penulis perlu adanya peningkatan sumber daya aparat kampung sehingga mampu merancang pembangunan kampung bersama masyarakat sehingga tercipta perencanaan yang mengakomodir kepentingan seluruh warga kampung. Penduduk di kampung Skouw Mabo juga sangat kesulitan air bersih dan hanya menggantungkan hidupnya pada mata air dipuncak gunung Skouw. Sehingga hal ini memungkinkan menjadi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan.

Dalam kaitannya dengan meminimalisir kejahatan lintas batas negara yang melalui kampung Skouw Mabo, maka penduduk dikampung ini berperan aktif dengan menjaga keamanan kampungnya. Tetapi juga menghindari warga kampung terutama pemuda dalam aktivitas ilegal dengan cara meningkatkan kegiatan keagamaan seperti ibadah pemuda dan juga saling memberi pemahaman di balai kampung jika mendapatkan persoalan seperti akibat minuman keras (miras) lokal. maka terkadang terjadi keributan dapat diselesaikan dengan baik oleh warga dikampung ini. Peran warga negara dikampung Skouw Mabo sebagai penduduk perbatasan sudah cukup baik dan perlu dijaga kelanjutannya kearah peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

- **Tantangan yang di Hadapi**

Tantangan yang dihadapi oleh negara dalam hal ini diwakili oleh aparat Kampung dikampung Skouw Mabo adalah sebagai kampung perbatasan. Pemerintah kampung dengan sumber daya manusia terbatas perlu memahami aturan internasional dalam hal pengaturan pasar tradisional perbatasan yang dalam pengamatan penulis lebih

didominasi oleh penduduk luar kampung perbatasan. Keadaan ini cenderung tidak membawa manfaat bagi masyarakat perbatasan. Disisi lain pemerintah kampung tidak memiliki domain lebih untuk mengatur wilayahnya dengan baik karena konsep keamanan tradisional atau keamanan negara lebih ditonjolkan oleh negara dengan banyaknya pos tentara diwilayah ini. Jika dibandingkan dengan konsep keamanan non tradisional demi percepatan pembangunan manusia perbatasan.

Tantangan yang dihadapi oleh penduduk perbatasan sebagai warga negara adalah bahwa sebagai penduduk yang memiliki kesamaan ras dengan penduduk di Wutung Papua Nugini bahkan bersaudara terkadang ditantang untuk melampui kedaulatan negara akibat memiliki kebun di wilayah negara tetangga Papua Nugini maupun sebaliknya. Akibatnya peran warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara atau wilayah seakan-akan diabaikan. Disatu sisi, hal ini berdampak juga bagi persediaan sumber daya alam diwilayah perbatasan negara jika tidak diatur dengan baik oleh negara seperti persediaan air, persediaan kayu dihutan juga sumber daya lainnya. Sehingga perlunya peningkatan kualitas manusia perbatasan sehingga warga perbatasan ditantang untuk mampu menjaga keutuhan wilayah negara dan kampungnya demi masa depan warga perbatasan dan keberlanjutan hidup masyarakat.

#### 4. Penutup

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran negara diwilayah perbatasan dalam kajian kampung Skouw Mabo di Distrik Muara Tami Kota Jayapura belum berjalan optimal. Terdapat beberapa faktor penyebab. *Pertama*, sumber daya aparatur pemerintahan kampung yang rendah. *Kedua*, sarana dan prasarana pendukung yang sangat minim baik infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pasar. Dan *ketiga* belum adanya rencana induk pembangunan kampung perbatasan yang ditetapkan oleh negara. Masyarakat adat di wilayah kampung Skouw Mabo belum sejahtera akibat minimnya sarana dan prasarana pendukung. Juga akibat rendahnya sumber daya manusia masyarakat kampung ini.

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam kesempatan ini adalah perlu untuk meningkatkan Sumber daya aparatur pemerintahan kampung perbatasan negara. Perlu juga diupayakan pembangunan sarana dan prasarana pendukung dikampung perbatasan. Selain itu juga disarankan adanya pembuatan rencana induk pembangunan kampungadat perbatasan. Dan yang terpenting adalah segera mungkin untuk meningkatkan SDM masyarakat adat perbatasan negara demi keutuhan NKRI.

#### 5. Daftar Pustaka

- Jemadu, Aleksius. 2014, *Politik Global Edisi 2*, Graha Ilmu Press, Yogyakarta
- Bungin, Burhan. 2008, *Penelitian Kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya)*”, cetakan kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media Group Press.
- Mutimer, David. 1999, *”Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies”*, dalam *Contemporary Security and Strategy*, Craig A.Snyder (ed), London: Macmilan Press Ltd.

Madu, Ludiro. Dkk. 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*, Graha Ilmu Press, Yogyakarta

WL, Neuman. 2007, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*, Fourth Edition, Boston: Allyn adn Bacon.

Silalahi, Ulber. 2012, *Metode Penelitian Sosial Bandung*, PT Refika Aditama

Komunitas Demokrasi Indonesia, 2011, *Modul Demokrasi*, KDI Press, Jakarta